

SIKAP RUSIA TERHADAP PROTOKOL PERJANJIAN SEANWFZ (SOUTHEAST ASIA NUCLEAR WEAPONS FREE ZONE)

Oleh:

Luqman Hamid¹

Pembimbing : Ahmad Jamaan S.IP, M.Si

Email and Phone : luqman.new@gmail.com/ +6282385877730

Bibliografi : 7 Jurnal, 9 Buku, 7 Dokumen, 1 Skripsi, 30 Situs Internet

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293 Telp. (0761) 63277, 23430

Abstact

This study describes Russia's decision in Treaty of South-East Asia Nuclear Weapons Free zone (SEANWFZ) or as know as Bankok Treaty, this treaty is one of treaty Nuclear Weapons Free Zone (NWFZ) that already exist in the few regional in the world. These day there are five treaties, Tlateloco Treaty (America Latin and carribia), Rorotonga Treaty (South Pacific), Bangkok Treaty (SouthEast Asia), Pelindaba Treaty (Africa), and NWFZ in Central Asia (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan). In general this treaty has role about nuclear weapons, such as; prohibit development, testing, manufacture, posssession and everything that have relation with nuclear weapons in the designed teritory, and prohibit use or threat of use nuclear againts another nations. Same like the other treaty of NWFZ, to make SEANWFZ treaty can be implemented it needs admitation and ratification from 5 security council of UN or Nuclear Weapons States (NWS). But in the development of this treaty Russia take a stand to refused this treaty.

The theory that applied in this research is neo-realism as paradigm where the international system give influence to the national or states decision or the policy that they were made. Level analysis in this research is System Level Analysis, cause it can explained and give anlaysis in comprehensive scope for every single interaction of actors in one system where they interact. researcher also use theory from Viotti and Kauppi about policy decision is influence by interest, opportunities, threats, and capabilities

The study found that the Russia's reasons take a stand to refuse ratification this treaty are because SEANWFZ; is not reputed or not considered ready for NWFZ concept, the designed teritory that they were made is to wide because include ZEE and also Russia has interest in South China Sea about spreads the Russia's economic, plus more ASEAN and China still have teritory conflict in South China Sea, and the ambiguity of ASEAN to support world peace from nuclear weapons.

Keywords : ASEAN, nuclear weapons, NWFZ, SEANWFZ Treaty, Russi

¹ Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional angkatan 2011

PENDAHULUAN

Penelitian ini membahas mengenai sikap Rusia sebagai salah satu anggota keamanan PBB dan juga sebagai *Nuclear Weapons States* (NWS), atau negara pemilik senjata nuklir yang menolak untuk menandatangani perjanjian anti senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara (SEANWFZ). Sikap dari Rusia ini sendiri terbanding terbalik dengan apa yang seharusnya terjadi, karena Rusia sendiri telah melakukan kerjasama secara komprehensif termasuk di bidang politik dan keamanan antar kedua aktor politik internasional ini.

Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone (SEANWFZ) merupakan suatu gagasan yang terbentuk dari Deklarasi ASEAN atas *ASEAN zone of peace, freedom, and neutrality* (ZOPFAN) yang ditandatangani oleh lima anggota pendiri ASEAN pada saat itu di tahun 1971. Alasan utama kenapa perjanjian ini dibuat adalah karena di masa perang dingin begitu terjadi banyak perkembangan senjata yang terjadi antara dua kubu yaitu blok barat dan blok timur. Nuklir sebagai salah satu yang tergolong dalam senjata pemusnah selain senjata kimia dan biologi merupakan ancaman yang begitu serius bagi tiap negara terutama negara yang masih lemah terhadap ketahanan nasionalnya.

Mengingat Asia Tenggara di masa itu masih tergolong sebagai negara berkembang seperti pembangunan dan ekonomi, sehingga membutuhkan sebuah kebijakan yang dapat memungkinkan mereka tidak terlibat dalam apapun terkait dengan senjata nuklir.

Pembentukan perjanjian SEANWFZ sejalan dengan awal pembentukan ASEAN sendiri di mana salah satu prinsip dalam Piagam Asean adalah berbagi komitmen dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran regional dan menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tin-

dakan lain dalam cara yang tidak sesuai dengan hukum internasional.²

Dengan perjanjian SEANWFZ ini, Asia Tenggara menjadi area geografik kelima yang akan mendeklarasikan zona bebas terhadap senjata nuklir, sebelumnya sudah ada perjanjian serupa seperti *Antarctic Treaty*, *the Treaty of Tlateloco (covering Latin America and the Caribbean)*, *the Treaty of Rarotonga (the South Pacific)* dan *the Treaty of Pelindaba (Africa)*.³

Senjata nuklir pada awalnya belum mempunyai definisi yang jelas tentang senjata apa saja yang bisa di kategorikan sebagai senjata nuklir, hingga tahun 1985, dalam *South Pacific Nuclear Free Zone Treaty* (Perjanjian Rarotonga). perjanjian pada tahun 1996, *African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty* (Perjanjian Pelindaba) yang mendefinisikan senjata nuklir sebagai :

“‘nuclear explosive device’ means any nuclear weapon or other explosive device capable of releasing nuclear energy, irrespective of the purpose for which it could be used.”⁴

Kewajiban yang wajib dipatuhi oleh para anggota ASEAN terhadap SEANWFZ adalah :

1. Negara anggota tidak diperbolehkan mengembangkan, memproduksi, memperoleh, atau memiliki kontrol terhadap senjata nuklir.
2. Tidak boleh memiliki pangkalan senjata nuklir, menguji atau menggunakan senjata nuklir di manapun baik di luar atau di dalam zona perjanjian.
3. Tidak mengambil tindakan untuk membantu, mendukung, membuat,

² Dirjen Kerjasama ASEAN, 2012, *ASEAN Selayang Pandang*, edisi ke-20, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jakarta. Hlm. 22

³ Tersedia di <<http://www.nti.org/treaties-and-regimes/southeast-asian-nuclear-weapon-free-zone-seanwfp-treaty-bangkok-treaty/>> Di akses tanggal 22 Oktober 2014

⁴ Steve Fetter, *The technical Dimension: Stockpile Declarations* (sipri.org) hlm. 133

menghasilkan ataupun mendapatkan setiap perlengkapan dari peledak nuklir dari negara manapun.

4. Tidak menyediakan sumber atau material atau kelengkapan senjata nuklir kepada setiap negara bebas senjata nuklir/ Non Nuclear Weapon State (NNWS) ataupun Nuclear Weapons State (NWS). Kecuali subjek tersebut dalam pengawasan atau penjagaan oleh International Atomic Energy Agency (IAEA);
5. Mencegah wilayah negara anggota menempatkan perlengkapan peledak nuklir, dan mencegah pengujian senjata nuklir;
6. Tidak membuang sampah radioaktif di laut yang termasuk dalam zona perjanjian.

Wilayah zona yang dicakupkan dalam perjanjian termasuk wilayah teritori negara, wilayah kontinental dan Zona Ekonomi Eksklusif dari negara anggota.

Jika dilihat cakupan kawasan-kawasan bebas nuklir yang ada saat ini, yaitu kawasan Antartika, kawasan Amerika Latin dan Karibia, kawasan Asia Tenggara, kawasan Afrika, kawasan Pasifik Selatan, kawasan Asia Tengah, sesungguhnya ruang gerak senjata nuklir sudah sangat dibatasi.⁵ Namun demikian, hampir semua kawasan bebas nuklir itu lemah dalam penerapan aturannya sehingga penetapan sebagai kawasan bebas nuklir pada umumnya belumlah operasional, atau baru sebatas kertas perjanjian.

Melalui rencana aksi SEANWFZ itu, ASEAN ingin mengajak kawasan-kawasan bebas nuklir lainnya untuk membenahi kembali status bebas nuklir di kawasan-kawasan

lainnya, sekaligus menegaskan kembali penolakan sebagian besar warga dunia terhadap senjata pemusnah massal tersebut.⁶

Pada tahun 1997, perjanjian SEANWFZ memasuki instrumen yang diratifikasi oleh 8 anggota negara. Tanggal 25 juli para petinggi ASEAN mengingat kembali bahwa komisi yang akan didirikan dalam perjanjian itu akan mengawasi pelaksanaan dari perjanjian tersebut dan menyakinkan kepatuhan dengan ketentuan yang berlaku.

ASEAN melalui perjanjian anti nuklir mengajak negara NWS yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, Inggris, dan Perancis untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap zona bebas nuklir dengan menyetujui protokol perjanjian tersebut.⁷

Perkembangan tentang perjanjian SEANWFZ berlanjut pada pertemuan para Menteri Luar Negeri tiap negara ASEAN di Manila, Filipina. Para Menteri mengulas tentang implelementasi dan rencana pelaksanaan di masa mendatang atas implementasi perjanjian tersebut. Pertemuan tersebut menghasilkan Pernyataan Bersama atau *Joint Statement* yang berisi tentang kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan atau dituruti oleh Negara ASEAN.

Pernyataan itu juga mengandung langkah-langkah yang akan dilakukan di bawah *Plan of Action* (2007-2012).⁸ Langkah-langkah ini juga termasuk pemenuhan komitmen Perjanjian dan pencapaian terhadap perlindungan IAEA, mengejar konsultasi dengan NWS untuk

⁵ Rakaryan sukarjaputra, SEANWFZ, Korut, dan Keamanan Asia. Tersedia di <http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=8531&coid=1&caid=27&gid=3> diakses tanggal 20 April 2015.

⁶ *Ibid.*,

⁷ Ade Marboen, Negosiasi bebas nuklir ASEAN-P5. Diakses dari <<http://www.antaranews.com/berita/284810/negosiasi-i-bebas-nuklir-asean-p5-sangat-produktif>> diakses tanggal 18 April 2015

⁸ Tersedia di <<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-statement-of-the-asean-foreign-ministers-on-the-observance-of-asean-day-manila-30-july-2007>>. Di akses tanggal 25 November 2014

meratifikasi Protokol Perjanjian, mencari kerja sama dengan badan Internasional dan Regional dalam mengembangkan kerangka kerja yang bertaraf internasional dan keamanan nuklir, membangun jaringan regional untuk pemberitahuan kecelakaan nuklir yang lebih cepat, mengembangkan persiapan darurat regional, dan meningkatkan kapasitas bangunan terhadap keamanan nuklir.

Pada tahun 2011 merupakan tahun yang memberi pengaruh besar terhadap ASEAN terkait perjanjian SEANWFZ, di tanggal 7-8 Mei Konferensi ASEAN ke 18 dilaksanakan di Jakarta dimana Dr. Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua konferensi, mengeluarkan pernyataan tentang persetujuan partisipasi untuk melanjutkan upaya internasional untuk mencapai dunia yang bebas terhadap senjata nuklir dan meningkatkan partisipasi untuk ikut serta dalam membagi informasi yang transparan dan relevan terkait dengan masalah nuklir di wilayah Asia Tenggara.⁹

Tanggal 8-12 Agustus untuk pertama kalinya lima negara NWS yaitu; Tiongkok, Perancis, Rusia, dan Inggris, serta AS bertemu secara resmi dengan ASEAN untuk mendiskusikan ratifikasi tentang Protokol perjanjian SEANWFZ. Protokol tersebut menetapkan bahwa NWS harus mematuhi isi dari perjanjian dan tidak menggunakan ancaman menggunakan senjata nuklir untuk melawan negara anggota perjanjian.

Tiongkok yang sebelumnya sudah menyatakan kesediaannya untuk meratifikasi protokol, namun 4 negara lain menganggap cakupan geografik dari perjanjian sebagai sebuah hambatan. Walaupun tidak ada kesepakatan yang dicapai, tapi tiap anggota akan kembali membicarakan masalah ini di bulan oktober untuk melanjutkan

kesepakatan. Pada pertemuan KTT ASEAN di bulan November, para anggota ASEAN mencoba menyelesaikan perbedaan substantif dan menyimpulkan untuk bernegosiasi kembali dengan NWS untuk meyetujui perjanjian. ASEAN dan lima negara NWS akan terus bernegosiasi terkait masalah prosedural.

Perkembangan selanjutnya pada pertemuan para Menteri Luar Negeri tiap negara negara ASEAN di tahun 2012 menghasilkan penandatanganan protokol yang di mulai oleh para anggota ASEAN yang kemudian akan di ikuti oleh negara NWS. Namun demikian penandatanganan di tunda hingga bulan November. Hal ini di karenakan negara NWS mengeluarkan pernyataan bahwa belum siap untuk menanda tangani protokol SEANWFZ, di bulan oktober di tahun yang sama perjanjian SEANWFZ kembali mendapat dukungan oleh duta besar AS Laura E. Kennedy di sidang PBB terkait senjata nuklir dimana Laura menyatakan “kami sedang berusaha untuk mengajak negara P5 menanda tangani Protokol Perjanjian Bangkok secepatnya.”¹⁰

Pada pertemuan KTT ASEAN yang ke 21, tiap anggota ASEAN menekankan untuk lebih meningkatkan solidaritas dan kerjasama regional dalam kepentingan perdamaian, keamanan di wilayah yang tercantum dalam SEANWFZ. Hanya Tiongkok dan AS yang memiliki niat untuk menandatangani protokol tersebut, namun Rusia, Perancis dan Inggris masih tidak menunjukkan niat untuk menanda tangani perjanjian tersebut.

Alasan ketiga negara tersebut adalah adanya ketidaksesuaian dan kecocokan isi perjanjian tersebut dengan apa yang di kehendaki oleh tiap negara. Alasan dari Inggris, Perancis dan Rusia belum menandatangani Protokol Perjanjian

⁹ Tersedia di <<http://www.gatra.com/politik-1/4828-segera-tanda-tangani-protokol-anti-senjata-nuklir.html>>. Di akses tanggal 25 November 2014

¹⁰ Tersedia di <<https://geneva.usmission.gov/2013/01/22/ambassador-kennedys-statement-at-the-conference-on-disarmament-plenary/>> . Di akses tanggal 27 Oktober 2014.

SEANWFZ adalah karena; Pertama, Perancis tidak setuju dengan isi Perjanjian SEANWFZ karena Perancis berpedoman pada Piagam PBB Pasal 51 senjata nuklir di perbolehkan untuk membela diri. Kedua, Inggris meminta jaminan ASEAN bahwa anggotanya tidak akan membuat senjata pemusnah masal seperti senjata kimia dan biologi. Dan ketiga, Rusia menyatakan perjanjian ini masih banyak kekurangan dan belum siap untuk di tandatangani.¹¹

Dari alasan ketiga negara di atas penulis tertarik terhadap alasan Rusia menolak perjanjian tersebut, padahal sebelumnya Rusia dan ASEAN melakukan kerja sama baik itu masalah ekonomi ataupun keamanan. Kedua aktor internasional ini juga melakukan kerja sama secara komprehensif.

Perjanjian SEANFWZ bagi negara ASEAN sendiri merupakan jaminan masa depan kehidupan bebas dari senjata nuklir terutama untuk regional Asia Tenggara, Senjata Nuklir yang tergolong kedalam *Weapons of Mass Destruction* (WMD)¹² adalah ancaman yang begitu nyata yang dihadapi oleh semua negara.

Apalagi negara yang tidak termasuk negara yang tidak boleh mengembangkan nuklir seperti Korea Utara, India, Pakistan, dan Israel yang di anggap memiliki senjata nuklir. Sehingga untuk menjalankan perjanjian ini dengan maksimal diperlukan persetujuan dari NWS, namun demikian hanya Tiongkok dan Amerika Serikat yang menunjukkan sikap mendukung, sementara tiga negara lainnya menolak atau belum mau untuk menandatangani perjanjian tersebut.

Dari ketiga negara tersebut, yaitu Inggris, Perancis, dan Rusia. Hanya Rusia yang memberikan alasan yang tidak sesuai

dengan sikap Rusia yang semestinya, karena sebelumnya Rusia dan ASEAN telah menjalin kerja sama. Salah satunya terkait dengan kerja sama peningkatan dan penguatan keamanan di kedua wilayah baik itu ditingkat regional atau internasional. Sehingga menurut penulis hal ini perlu untuk di teliti.

Dalam pembahasan ini agar penelitian menjadi lebih terfokus, maka penulis membatasi masalah yaitu kaitan NWS dengan negara ASEAN mengenai alasan belum bersedia atau menolak menandatangani perjanjian SEANWFZ, terutama motivasi Rusia dalam menolak perjanjian tersebut.

Berdasarkan pada batasan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis menggunakan penelitian pertanyaan sebagai berikut ;

Mengapa Rusia mengambil sikap untuk menolak menandatangani Protokol Perjanjian SEANWFZ dengan ASEAN?

Kerangka Teori

Dalam menjelaskan dan memaparkan guna menghantarkan pada penjelasan yang sistematis mengenai permasalahan yang dibahas ini maka teori yang digunakan dalam peneliti ini adalah neo-realisme atau realisme struktural. Menurut pandangan Waltz tentang paradigma neorealisme negara yang melakukan kerjasama berdasarkan pada *self-interest* yang digunakan untuk memenuhi tujuan *survival*-nya.¹³ Namun, neo-realisme memandang secara pesimis terhadap hasil dari kerjasama, neo realisme percaya bahwa kerjasama tidak akan terjadi bila negara tidak menginginkannya itu terjadi.

Sistem internasional yang tanpa otoritas lebih tinggi (kondisi yang disebut sebagai anarki internasional) berdampak pada perilaku negara. Salah satunya adalah meningkatkan pertahanannya karena tidak

¹¹Tersedia di
<<http://www.tempo.co/read/news/2013/06/10/118487163/ASEAN-Desak-Negara-Besar-Dukung-Zona-Anti-Nuklir>>. Di akses tanggal 21 Oktober 2014

¹² Tersedia di
<http://en.wikipedia.org/wiki/Weapon_of_mass_destruction> . diakses tanggal 19 April 2015

¹³ Kenneth Waltz., 2001. *Man, the State and War*. New York: Columbia University Press. Hlm 11

adanya jaminan negara lain tidak akan menyerang mereka.¹⁴

Level analisis merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah sosial karena dengan memfokuskan analisis terhadap tingkatan tertentu penulis akan semakin mudah dalam menjelaskan permasalahan dan menyusun penelitian dengan lebih mendetail dengan prediksi penelitian yang lebih *reliable* dan dapat dipercaya.¹⁵

Peneliti memutuskan untuk menggunakan level analisis sistem karena level analisis sistem disebut sebagai tingkat analisis yang paling komprehensif di antara level analisis yang ada, karena “dapat memberikan pola umum tentang perilaku negara dan tingkat saling ketergantungan di antara mereka”.¹⁶

Selanjutnya level analisis sistem akan menjelaskan pengaruh distribusi kekuatan antar negara-negara *super power* terhadap negara-negara lain. Singkatnya, apabila peneliti mengambil level analisis sistem, peneliti tersebut harus memahami bagaimana bentuk dari sistem internasional dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi tindakan aktor.

Level Analisis Sistem adalah suatu pendekatan terhadap studi politik dunia yang menyatakan bahwa faktor eksternal bagi negara dan lingkungan politik dunia bergabung untuk menentukan pola interaksi antara negara dan aktor-aktor transnasional lainnya.¹⁷ Pada analisis tingkat sistem, lebih

memfokuskan pada sistem global, yakni, interaksi semua aktor di panggung global. Tingkat global merupakan keseluruhan tertinggi dimana aktor dan individu merupakan “bagian”. Negara sering terpaksa mengambil tindakan tertentu yang realistis dari dunia di mana mereka berada.

Level analisis sistem memiliki keunggulan dalam memberikan analisis yang mencakup keseluruhan interaksi aktor di dalam sistem dari hasil generalisasi perilaku negara.

Sebagai acuan analisa dalam penelitian ini, penulis merujuk kepada tulisan yang dipaparkan oleh Paul R. Viotti dan Mark V. Kauppi. Penulis menggunakan pendapat ini untuk menjelaskan atas sikap Rusia yang belum bersedia menandatangani Perjanjian SEANWFZ. Dalam buku *International Relations and World Politics Security, Economy, Identity*. Viotti dan Kauppi menjelaskan bahwa yang menjadi dasar pendorong dikeluarkannya objektifitas sebagai produk keputusan terbagi dalam empat hal;¹⁸

1. Kepentingan

Sebuah negara yang berbentuk demokrasi ataupun diktator, dalam mengeluarkan kebijakan biasanya di dasarkan pada kepentingan nasional. Yang dilakukan karena status kedaulatan, untuk mempertahankan kesejahteraan dan kepentingan ekonomi negara, kepentingan kesejahteraan dan ekonomi tidak hanya dilihat sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai sumber penting bagi kekuatan dalam hubungan antar bangsa, dan yang terakhir pemeliharaan nilai-nilai penting yang ada dalam masyarakat.

2. Tekanan

Dalam pencapaian objektifitas, sistem global merupakan tekanan yang juga

¹⁴ John Mearsheimer., 2006. “Structural Realism” dalam *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, dieditori Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith Oxford: Oxford University Press. hlm. 72

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 77-92

¹⁶ Bruce Russett & Harvey Starr. 1996. *World Politics: The Menu for Choice* (New York: W. H. Freeman Company. hal. 11

¹⁷ John T Rourke, 1995. *International Politics on the World Stage, 5th ed.*, Connecticut: Dushking Publishing Group. Hlm. 39

¹⁸ Paul R Viotti & Mark V Kioppi, 1997. *International Relations and World Politics: Security, Economic, Identity*. Prentice Hall, Inc. Hlm 56

mempengaruhi keluarnya suatu keputusan oleh suatu negara atau aktor politik internasional. Ancaman ini dapat dilihat langsung sebagai ancaman secara terang-terangan kepada negara atau merupakan ancaman tidak langsung. Hal tergantung bagaimana suatu negara menyikapi suatu permasalahan atau fenomena pada sistem global.

3. Kemampuan

Pembantuan objektifitas kebijakan luar negeri, pembuatan keputusan melihat kepentingannasional sebagai hal yang mendasar serta ancaman ditambah dengan peluang yang hal tersebut berasal dari sistem internasional. Namun, beberapa bukti memperlihatkan adanya kemampuan dan kekuasaan dari dalam negeri yang mendorong tercapainya keputusan

4. Peluang

Pencapaian objektifitas, juga melihat bahwa sistem global hanya sebagai ancaman bagi kepentingan nasional, tetapi dapat juga menjadi peluang yang mempengaruhi pembuatan objektifitas kebijakan luar negeri.

Dari landasan teori yang digunakan dapat dikatakan penolakan penandatanganan perjanjian SEANWFZ dapat didasarkan pada sikap Rusia yang skeptis pada perjanjian tersebut dan Rusia juga mempertimbangkan segala sesuatu apa yang dapat terjadi jika menandatangani perjanjian SEANWFZ.

PEMBAHASAN

Penelitian ini akan menjelaskan bahwa setiap kebijakan atau keputusan oleh sebuah negara dapat dipengaruhi bukan saja oleh aksi dari negara lain, namun dapat berasal dari perkembangan dunia internasional yang terikat satu sama lain dan saling berinteraksi. Jadi pengambilan sikap Rusia ini bukan saja dipengaruhi oleh ASEAN selaku organisasi internasional regional namun juga dapat dari apa yang akan terjadi

jika perjanjian ini diterapkan dan bagaimana respon dari sistem internasional. Karena dari tiap keputusan yang dilakukan oleh setiap aktor akan tidak tanggap dengan beragam aksi oleh aktor-aktor yang terlibat didalamnya.

Jika melihat tujuan dasar dari pembentukan perjanjian ini untuk menjaga perdamaian dunia dari penyebaran dan penggunaan senjata nuklir sudah sepatutnya Rusia sebagai salah satu negara yang cukup berpengaruh di dunia internasional seharusnya turut membantu penyelesaian perjanjian ini dengan meratifikasinya. Namun demikian, Rusia tidak melakukan hal tersebut. Tindakan yang diambil Rusia ini memiliki beberapa alasan sehingga perlu dipertimbangkan kembali untuk meratifikasi perjanjian tersebut.

Perbedaan Isi SEANWFZ dengan NWFZ Lainnya

Perjanjian SEANWFZ secara umum sebenarnya tidak ada perbedaan yang begitu mencolok dengan perjanjian NWFZ lainnya terkait senjata nuklir. Namun SEANWFZ melakukan perbedaan pada batasan wilayah yang masuk kedalam cakupan perjanjian, yaitu memasukkan wilayah landasan kontinen dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tambahan peraturan ini berbeda dengan perjanjian NWFZ lainnya yang tidak memasukkan cakupan wilayah ZEE dan landasan kontinen.

Contohnya seperti perjanjian Pelindaba di Afrika, Perjanjian Tlateloco di Amerika Latin dan Karibia, yang hanya menggunakan garis bujur untuk menentukan batas wilayah dengan memasukan wilayah negara dan batas laut teritorial.

Pada perjanjian NWFZ di Afrika zona yang diaplikasikan adalah teritori negara dari benua Afrika dan negara kepulauan yang termasuk kedalam OAU (*Organization of Africaa Unity*). Namun pada perjanjian ini AS dan Rusia belum meratifikasinya.

Bahkan perjanjian Tlateloco dapat melakukan pengecualian terhadap wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah laut Amerika Serikat.¹⁹ Hal ini dikarenakan adanya paksaan dari AS untuk melakukan pengecualian karena AS sendiri memiliki kapal selam di kawasan lautannya yang membawa senjata nuklir didalamnya (SCMB).

Dalam perjanjian UNCLOS terkait dengan peraturan wilayah ZEE menjelaskan (pasal 57) Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur.²⁰ Dengan jarak yang cukup luas membuat cakupan wilayah dari perjanjian ini sangat lebar. Didalam UNCLOS juga dijelaskan pada pasal 58 soal hak dan kewajiban negara lain di daerah ZEE bahwa negara lain memiliki hak kebebasan pelayaran dan penerbangan selama berada dikawasan ZEE yang berkaitan dengan pengoperasian kapal dan pesawat udara.

Dengan adanya dua bentuk peraturan internasional di wilayah ZEE Asia Tenggara tersebut, Rusia menganggap hal ini dapat menghilangkan peraturan UNCLOS/ Hukum Laut Internasional jika mengikuti cakupan wilayah perjanjian. UNCLOS juga dianggap sebagai peraturan yang memiliki otoritas tertinggi dalam mengatur hukum laut internasional dan sudah diakui oleh seluruh anggota PBB. Sehingga muncul sikap kebaratan dari Rusia untuk meratifikasi perjanjian ini.

Sikap ASEAN sendiri yang memasukkan wilayah ZEE ini kemudian juga berdampak pada perbatasan Laut Cina Selatan yang saat ini masih belum selesai antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok hingga sekarang. Dengan adanya dua versi batas laut ini kemudian menjadi salah satu

penyebab Rusia tidak menyetujui perjanjian ini.

Perbatasan Laut Cina Selatan Yang Belum Jelas Antara Tiongkok dan ASEAN

Permasalahan lainnya adalah jika ingin meratifikasi perjanjian ini adalah dengan memiliki cakupan wilayah yang jelas. Walaupun ASEAN telah memaparkan wilayah yang telah ditetapkan, namun dibagian Laut Cina Selatan masih terjadi konflik atau ketidaksetujuan atas batasan wilayah antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN (Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina).

Tidak selesainya permasalahan ini dan semakin berlarut-larut karena tiap negara yang terlibat memiliki batasan wilayahnya menurut versinya masing-masing dan kepentingan negara. Jika mengikuti wilayah ZEE tiap negara ASEAN maka perbatasan laut Cina selatan akan berbenturan dengan batas laut yang di buat atau diklaim oleh Tiongkok.

Tidak kunjung selesai permasalahan perbatasan Laut Cina Selatan ini dikarenakan Laut Cina Selatan ini merupakan wilayah perairan terluas atau terluas kedua. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam dan selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia, perdagangan, dan pelayaran internasional. Sehingga wajar wilayah ini diperebutkan oleh tiap-tiap negara yang terlibat didalamnya.²¹

Melihat permasalahan ini yang berada di kawasan Asia Tenggara, ASEAN selaku organisasi internasional regional sudah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah ini melalui ARF (*ASEAN Regional Forum*). Langkah-langkah yang sudah dil-

¹⁹ Hiromichi Umebayashi. *Op.Cit.* Hlm. 8. Diunggah dari <http://www.peacedepot.org>. Diakses tanggal 6 April 2015

²⁰ Perjanjian UNCLOS pasal 57 terkait Lebar Zona Ekonomi Eksklusif

²¹ Tersedia di <<http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS>>, diakses tanggal 6 April 2015.

akukan oleh ARF sendiri adalah mengeluarkan tiga konsep dalam penyelesaian persengketaan Laut Cina Selatan yaitu melalui CBM (*Confidence Building Measures*), PD (*Preventive Diplomacy*), dan (*Conflict Resolution*) CR. (*Confidence Building Measures*) yang merupakan bagaimana pihak yang terkait bisa mengurangi ketegangan diantara mereka dengan tujuan untuk mencari penyelesaian dan sebagai langkah yang paling berguna untuk membuka jalan terhadap perjanjian yang lebih komprehensif.

PD (*Preventive Diplomacy*), yaitu itu upaya diplomasi pencegahan yaitu tindakan-tindakan kolektif yang dilakukan untuk mencegah konflik secara dini dan untuk menegakkan perdamaian diplomasi pencegahan sesungguhnya merupakan kumpulan aksi diplomasi, politis, militer, ekonomi, dan kemanusiaan dan resolusi konflik merupakan upaya lebih jauh untuk kedua upaya yang telah dilakukan.²²

CR (*Conflict Resolution*) atau resolusi konflik merupakan upaya lebih jauh untuk kedua upaya yang dilakukan. Hal ini dapat dilakukan apabila kondisi negara yang terlibat sudah memanas dan memasuki konflik, sehingga peran CR diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini.

Permasalahan perbatasan Laut Cina Selatan yang terjadi antara Tiongkok dan beberapa negara ASEAN jika dipahami lebih lanjut akan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penyelesaiannya karena tiap negara memiliki kepentingan masing-masing terhadap laut Cina Selatan.

Dalam ketidaksetujuan Rusia untuk menandatangani perjanjian SEANWFZ karena batas wilayah yang belum jelas antara ASEAN dan Tiongkok di perbatasan laut Cina Selatan. Hal ini juga didorong Rusia yang memiliki kepentingan dengan ASEAN terkait ekonomi Rusia yang ingin merubah

haluan ke ASEAN, hal ini dilakukan karena Rusia saat ini memiliki hubungan yang tidak terlalu baik dengan negara-negara Eropa saat ini.

Perusahaan-perusahaan Rusia energi Rusia saat ini sudah mulai mengarahkan kerjasamanya ke wilayah Asia, sebagai contoh perusahaan yang hendak memasuki pasar energi Asia Tenggara adalah GAZPROM, dimana perusahaan ini bergerak dibidang tambang minyak lepas pantai dan eksplorasi gas. Perusahaan ini akan menemui kesulitan, karena tidak adanya batas wilayah yang pasti. Sebagai contoh GAZPROM telah menghadapi masalah di blok eksplorasi yang diklaim oleh Vietnam dan Tiongkok sekaligus.²³

Alasan ini juga diperkuat dengan jika terjadi bentrokan di wilayah maritim yang kecil sekalipun pasti akan mengacaukan rute perdagangan melalui jalur laut.²⁴ Sementara, lebih dari separuh ekspor minyak dunia dikirim melalui Laut Cina Selatan, untuk memasok Tiongkok, Korea Selatan, dan Taiwan dengan sumber daya yang mereka dibutuhkan guna kepentingan produksi industri. Jika rantai pasokan global terputus, perekonomian Eropa, termasuk Rusia akan ikut hancur.

Munculnya Global Trend Terhadap NWFZ

Perjanjian mengenai wilayah bebas senjata nuklir ditakutkan akan menjadi sebuah tren global, yang akhirnya diikuti oleh sebagian besar negara di dunia. Rusia melihat hal ini sebagai hambatan kebijakan nasional negaranya. Karena Rusia sendiri memiliki kebijakan untuk melakukan mod-

²² Tersedia di <<http://www.csis.or.id/Publications-OpinionsDetail.php?id=212>>. Diakses tanggal 5 April 2015

²³ Anton Tsvetov. Rusia Butuh ASEAN yang lebih kuat. 25 Maret 2015. Tersedia di <http://indonesia.rbth.com/politics/2015/03/25/rusia_butuh_asean_yang_lebih_kuat_27199.html>. Diakses tanggal 30 April 2015

²⁴ *Ibid.*,

ernisasi senjata nuklir yang dimilikinya mulai dari pengembangan senjata nuklir terbaru, melakukan daur ulang senjata nuklir yang telah usang, dan menambah daya hulu ledak nuklir. Jika kemudian NWFZ dapat menjadi tren global hal ini ditakutkan akan mempersempit ruang gerak rusia untuk melakukan pengembangan nuklir dan uji coba senjata nuklir.

Jika seluruh perjanjian NWFZ yang ada digabungkan maka hampir seluruh belahan bumi bagian selatan akan dilindungi oleh NWFZ. Munculnya *global trend* ini juga didasari oleh perhatian dunia internasional terhadap pengembangan senjata nuklir, beberapa faktor yang mendorong atau berkontribusi dalam *global trend* ini adalah ;²⁵

- a. Ketakutan yang muncul atas negara-negara seperti Korea Utara, Israel, Pakistan, India dan Iran yang kemungkinan besar memiliki senjata nuklir. Ditambah adanya kemungkinan negara-negara tersebut mengembangkan senjata nuklir yang lebih mematikan.
- b. Kekhawatiran bahwa organisasi terorisme atau aktor non negara memperoleh material nuklir dan memiliki kapabilitas untuk menciptakan senjata nuklir; dan
- c. Keinginan untuk mendirikan tenaga nuklir untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan mereka sendiri untuk membuat kemajuan yang signifikan dalam perlucutan senjata nuklir.

Faktor-faktor ini dianggap relevan dengan situasi sistem internasional saat ini. Ditambah negara-negara yang yang disebutkan diatas memiliki isu keamanan terkait dengan senjata nuklir.

Terdapat perbedaan kebijakan yang dimiliki oleh NWS, seperti Rusia, Amerika

Serikat, Perancis, Inggris dan Tiongkok. Rusia dalam membuat kebijakan tentang senjata nuklir dapat dikatakan bersifat *offensive* sedangkan sisanya lebih mengarah *defensive*, hal ini dapat dilihat dari kebijakan modernisasi senjata nuklir rusia yang lebih diutamakan oleh rusia dibandingkan Negara lainnya.

Walaupun Rusia dalam konsep keamanan nasional dan doktrin militer mengatakan bahwa senjata nuklir bagi rusia digunakan sebagai “penggunaan *tactical nuclear weapons* hanya akan dianggap sebagai alat untuk pertahanan rusia dan Negara aliansinya terhadap serangan dari Negara lain.”²⁶

Namun fakta yang ditemukan oleh *Nezavisimaya Gazeta*²⁷ memberitakan bahwa pada tahun 2014 Rusia mengadakan latihan militer besar-besaran yang melibatkan sepuluh ribu tentara dan seribu peralatan militer dari 30 unit senjata militer.²⁸ Latihan militer tersebut bertujuan untuk memastikan kesiapan pasukan militernya untuk operasi militer yang bersifat ofensif secara besar-besaran dalam penggunaan senjata nuklir.

Kebijakan Rusia dalam penggunaan senjata nuklir juga diperkuat dari kemampuan militer konvensional Rusia yang memburuk pasca runtuhnya Uni Soviet, ditambah hubungan Rusia dan Negara Eropa yang tid-

²⁶ Claudine Lamond. *Tactical Nuclear Weapons In Russian Foreign Policy*. Juni 2009, International Security Report. Hlm. 6. Di unduh dari <http://www.atlantic-community.org/app/webroot/files/articlepdf/140809_ISR%20-%20Russian%20TNW%20C%20Lamond.pdf> di akses pada 3 Mei 2015

²⁷ Surat kabar berita independen yang berlokasi di Rusia yang membahas mengenai kritikan terhadap politik, masyarakat, dan sejarah di Rusia yang di dirikan tahun 1990

²⁸ Zachary Keck. *Russia's Military Begins Massive Nuclear War Drill*. 29 Maret 2014. Tersedia di <<http://thediplomat.com/2014/03/russias-military-begins-massive-nuclear-war-drill/>>. Di akses tanggal 5 Mei 2014.

²⁵ Fr. Paul Lansu. “LOCAL ZERO” toward a Nuclear-Weapon-Free Zone in the Middle East. Pax Christi international. Hlm. 2. Di unduh dari <<http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0218-en-gl-sd.pdf>>. diakses tanggal 7 April 2015

ak begitu baik, sehingga Rusia menjadi semakin bergantung pada senjata nuklir yang dimilikinya. Hal ini terlihat dari dokumen keamanan Rusia yang menyatakan bahwa akan menggunakan senjata nuklir dalam kasus ancaman Negara Rusia terhadap Negara lain baik itu berupa ancaman militer menggunakan senjata konvensional maupun senjata nuklir.²⁹

Kebijakan Pesawat Udara Dan Kapal Asing

Pada perjanjian SEANWFZ pasal 7 berisi tentang kebijakan tentang hak lintas bagi pesawat dan kapal asing dimana setiap negara anggota dapat memutuskan atau mengizinkan kunjungan dari pesawat dan kapal asing baik itu di pelabuhan atau di bandar udara atau hanya melintasi kawasan teritori negara.

Hal ini kemudian juga menjadi pertimbangan Rusia untuk meratifikasi perjanjian tersebut, Karena negara-negara besar atau NWS memiliki kebijakan tentang *neither confirm nor deny* (NCND) yaitu kebijakan sebuah negara untuk “tidak mengkonfirmasi atau tidak menyangkal” tentang keberadaan nuklir yang dibawanya di dalam kapal ataupun pesawat terbang.

Dengan kebijakan tersebut memungkinkan terjadinya masuknya kapal atau pesawat sekutu dari negara Asia Tenggara untuk membawa senjata nuklir tanpa harus mengkonfirmasi dengan anggota lain apa isi dari pesawat atau kapal tersebut.

Saat ini ASEAN tengah berada dalam pengaruh hegemoni Negara besar antara AS, Rusia dan Tiongkok. Masuknya hegemoni negara tersebut tidak lepas dari kondisi geografis ASEAN yang begitu strategis ditambah posisi Laut Cina Selatan yang saat ini menjadi jalur perdagangan internasional terutama jalur lintas minyak dunia, dimana setengah dari pasukan minyak dunia untuk wilayah Eropa melalui jalur ini.

²⁹ *Ibid.*,

Ketiga negara adikuasa ini masing-masing memiliki peran, dimana Tiongkok sebagai negara yang terdekat dengan ASEAN ingin terus memasukkan hegemoni negaranya kedalam ASEAN, Amerika Serikat berusaha untuk mencegah atau menyaingi hegemoni Tiongkok di Asia Tenggara. Sedangkan Rusia menginginkan ASEAN sebagai Organisasi Regional untuk menjadi organisasi yang independen yang terlepas dari pengaruh AS dan Tiongkok walaupun secara tidak langsung Rusia juga menaruh kepentingan terhadap ASEAN.

Sebagai contoh masing-masing ketiga negara ini berusaha memberikan pengaruhnya. Pertama, Tiongkok yang ingin meluaskan pengaruhnya di ASEAN adalah dengan melakukan kerjasama *China-ASEAN free trade area*, bantuan dana baik militer dan ekonomi kepada Myanmar dan Kamboja³⁰. Amerika Serikat sendiri di dalam ASEAN mengambil peran sebagai negara penengah atau sebagai mediasi dalam penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan antara ASEAN dan Tiongkok. Walaupun Amerika Serikat sendiri menyatakan hal ini merupakan bantuan sebagai anggapan bahwa AS adalah polisi dunia, tidak bisa dipungkiri masuknya AS di kawasan ASEAN adalah untuk menyaingi hegemoni Tiongkok di ASEAN.

Sementara Rusia sendiri mengambil sikap untuk tidak memasukkan hegemoninya di wilayah ASEAN, walaupun ASEAN dan Rusia sudah melakukan beberapa kerjasama di berbagai bidang. Sikap ini tidak lepas dari Presiden Rusia yang ingin menghormati kedaulatan dan stabilitas negara-negara lain, dan tidak mencari peran hegemoni regional atau global.³¹ Atas dasar

³⁰ Graham Emde. *China and Southeast Asia: Hegemony or Cooperation?*. 6 Maret 2012. University of Denver. Hlm. 12. Di unduh dari <<http://grahamemde.com/pdfs/IPEHegemony.pdf>>. Di akses tanggal 4 Mei 2015

³¹ Julkifli Marbun, Putin Sebut Rusia Tidak Berambisi Rebut Hegemoni Dunia. Tersedia di <

ini juga kenapa Rusia menginginkan ASEAN sebagai perhimpunan negara regional Asia Tenggara sebagai organisasi yang mandiri

Karena saat ini dapat dilihat beberapa negara Asia Tenggara lebih condong ke Amerika Serikat seperti Singapura, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Myanmar dan Kamboja condong kepada Tiongkok, dan Vietnam condong ke Rusia. Hal ini kemudian membuat Rusia lebih mengkhawatirkan posisi hegemoni Amerika Serikat di Asia Tenggara yang dapat melabuhkan atau mendaratkan pesawat nya di negara aliansinya. Hal ini kemudian menjadikan sikap Rusia yang masih mengurungkan niatnya untuk menyetujui perjanjian ini.

Ambiguitas ASEAN Dalam Mendukung Perdamaian Dunia

Negara-negara ASEAN walaupun setuju dengan kawasan bebas nuklir untuk kawasannya sendiri, namun terdapat beberapa negara yang tidak mengikuti atau belum ikut serta dalam perjanjian-perjanjian yang berkaitan menjaga kelangsungan hidup manusia atau keamanan internasional. sikap itu kemudian menjadi sebuah pertimbangan apakah perlu untuk diratifikasi perjanjian SEANWFZ oleh Rusia yang beranggapan sikap ASEAN tidak mendukung perjanjian lainnya terkait masalah keamanan baik itu untuk kawasan regional ataupun internasional.

Beberapa perjanjian yang belum ratifikasi dan ditandatangani, seperti *Convention of Disarmament* dimana Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Singapura tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut, kemudian terdapat Myanmar yang belum meratifikasi

Biological and Chemical Weapons Conventions, dan *Nuclear Terrorism Convention* yang seluruh anggota ASEAN belum meratifikasi perjanjian tersebut. Hanya Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand yang baru menandatangani perjanjian tersebut.

Perjanjian-perjanjian yang belum diratifikasi atau ditandatangani oleh beberapa negara ASEAN sebenarnya memiliki peran yang tak kalah penting dengan perjanjian SEANWFZ karena kedua hal ini masih terkait dengan keamanan internasional.

Biological Weapons Convention merupakan perjanjian yang melarang untuk mengembangkan, memproduksi dan mengumpulkan Senjata Biologi dan Toxin yang sudah dibentuk pada tahun 1975.³² Sedangkan *Chemical Weapons Convention*, berisi tentang persetujuan untuk pelucutan dengan menghancurkan senjata kimia hingga ke fasilitas yang memproduksi senjata kimia yang berada di kawasan teritori negara.³³

Kedua perjanjian inilah yang tidak atau belum diratifikasi oleh Myanmar, padahal kedua perjanjian ini adalah dua elemen penting dari upaya dunia internasional untuk mengontrol penyebaran senjata pemusnah masal atau dikenal sebagai WMD.

Convention of Disarmament yang mana Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, dan Singapura tidak ikut serta dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian pelucutan senjata itu sendiri berisi tentang kerjasama multilateral yang berkaitan dengan masalah pengendalian dan pembatasan penggunaan senjata, yang memfokuskan perhatian mereka terhadap isu; penghentian perlombaan senjata nuklir dan pembatasan penggunaan

<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/12/13/mxp98q-putin-sebut-rusia-tidak-berambisi-rebut-hegemoni-dunia>>. Di akses tanggal 4 Mei 2015.

³² Tersedia di *The Biological Weapons Convention*, <www.unog.ch/bwc> . diakses tanggal 7 April 2015.

³³ Tersedia di *Chemical Weapons Convention*. <<https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/>> . diakses tanggal 7 April 2015.

senjata nuklir, mencegah perang nuklir, dan pengaturan internasional yang efektif untuk menjamin NNWS terhadap penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir, serta transparansi dalam pengembangan senjata.³⁴

Kemudian terdapat *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty* (CTBT), perjanjian multilateral yang dibuat tahun 1996 yang mana negara yang ikut dalam perjanjian setuju untuk melarang penggunaan nuklir untuk tujuan militer dan sipil didalam kawasan negaranya masing-masing. Namun demikian, perjanjian ini belum diratifikasi oleh Thailand dan Myanmar, padahal perjanjian ini sangat sejat dengan perjanjian yang membantu dalam proses pembatasan penggunaan senjata nuklir

Yang terakhir *Nuclear Terrorism Convention*, secara umum perjanjian ini adalah Konvensi Internasional Pemberantasan Terorisme Nuklir dimana seluruh anggota ASEAN belum menandatangani perjanjian tersebut. Seharusnya jika ASEAN memang ingin perjanjian bebas senjata nuklirnya di ratifikasi oleh Rusia ataupun NWS lainnya seharusnya ASEAN turut serta untuk membantu beberapa perjanjian yang terkait masalah penggunaan senjata biologi, kimia, dan nuklir serta pembatasan atau pelucutan senjata nuklir. Karena senjata biologi, kimia dan nuklir tergolong kedalam senjata pemusnah masal/ WMD (*Weapons Mass Destruction*).

PENUTUP

Penelitian ini menjelaskan bagaimana suatu negara sebagai aktor rasional dalam perpolitikan hubungan internasional sangat memperhitungkan setiap tindakan yang diambil dan memperhatikan fenomena yang terjadi di dunia internasional baik itu yang berpengaruh atau berdampak langsung atau tidak langsung. Setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh sebuah aktor hub-

ungan internasional selalu dikaitkan dengan kepentingan yang ingin dicapai, setiap keputusan negara harus menguntungkan negaranya atau sesuai dengan kepentingan yang dimilikinya atau negara dapat juga bertindak tidak sesuai dengan apa yang aktor lainnya inginkan karena kebijakan yang dimilikinya memberi pengaruh negatif kepada negara. hal ini kemudian juga dapat berakhir dengan konflik internasional.

SEANWFZ yang merupakan sebuah perjanjian dan kepentingan bersama oleh negara anggota ASEAN memiliki tujuan untuk mencapai Asia Tenggara yang bebas akan senjata nuklir. Pendirian perjanjian ini juga berdasarkan sejarah Perang Dingin yang pada masanya menimbulkan ketegangan politik dan militer, hal ini bukan hanya terjadi pada negara yang terlibat langsung namun juga bagi negara-negara sekutu dan negara kecil atau memiliki *power* yang lemah di perpolitikan ini.

Pada masa itu juga setiap negara berada pada bayang-bayang atas ancaman senjata nuklir. Sehingga muncul lah konsep perjanjian NWFZ (*Nuclear-Weapons-Free zone*) yang diciptakan untuk melindungi segenap negara yang berada disatu regional wilayah. SEANWFZ juga muncul dari konsep ZOPFAN (*Zone of Peace, Free, and Neutral*) adalah sebuah deklarasi oleh negara anggota ASEAN untuk menjadi negara yang damai, bebas, dan netral yang dapat dibangun secara bersama-sama.

Namun jika melihat tujuan perjanjian ini hanya dengan sekilas dapat dikatakan perjanjian ini memiliki niat yang sangat terpuji dimana ingin melindungi segenap warga negaranya yang berada dalam cakupan wilayah perjanjian SEANWFZ terbebas dari ancaman senjata nuklir. Tapi untuk mengimplementasikan perjanjian ini dengan sepenuhnya dibutuhkan pengakuan dan ratifikasi oleh NWS, negara pemilik senjata nuklir secara resmi atau lebih dikenal sebagai 5 negara Dewan Keamanan PBB.

³⁴ Tersedia di *An Introduction to th Conference*, <
<http://www.unog.ch/>> . Diakses tanggal 7 April 2015

Rusia sebagai salah satu NWS adalah satu dari tiga negara yang menolak untuk meratifikasi perjanjian ini, sikap yang diambil oleh Rusia ini sangat berbanding terbalik dengan hubungan Rusia dengan ASEAN. Rusia-ASEAN sudah memiliki hubungan kerjasama yang begitu banyak bahkan hampir diseluruh bidang yang mempengaruhi setiap aspek kehidupan. Hal ini kemudian menjadi suatu keganjilan yang perlu untuk diteliti lebih lanjut.

Perjanjian SEANWFZ yang dibuat oleh ASEAN merupakan perjanjian yang telah diratifikasi oleh seluruh semua anggota dan ASEAN juga menyatakan bahwa perjanjian ini tidak perlu untuk didiskusikan lagi. Namun Rusia melihat perjanjian ini masih memiliki kekurangan dan di beberapa aspek dapat merugikan negara Rusia sendiri terlepas apakah hal tersebut diketahui atau tidak diketahui oleh negara anggota ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Chin, Lionel Yee Woon., 1998. Nuclear Weapon-Free Zones – A Comparative Analysis Of The Basic Undertakings In The Seanwfz Treaty And Their Geographical Scope Of Application. Singapore Journal of International & Comparative Law. Pp 175-190

Claudine Lamond. *Tactical Nuclear Weapons In Russian Foreign Policy*. Juni 2009, International Security Report. Hlm. 6. Di unduh dari <<http://www.atlantic-community.org/app/webroot/files/articlepdf> > di akses pada 3 Mei 2015

Graham Emde. *China and Southeast Asia: Hegemony or Cooperation?*. 6 Maret 2012. University of Denver. Hlm. 12. Di unduh dari <

<http://grahamemde.com/pdfs/IPEHegemony.pdf>>. Di akses tanggal 4 Mei 2015

Lansu, Fr. Paul. “LOCAL ZERO” toward a Nuclear-Weapon-Free Zone in the Middle East. Pax Christi international. Hlm. 2. Di unduh dari <<http://www.paxchristi.net/sites/default/files/2014-0218-en-gl-sd.pdf>>. di akses tanggal 7 April 2015

Umebayashi , Hiromichi. April 2004. A Northeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (NEA-NWFZ). Di unggah dari <http://www.peacedepot.org>. Diakses tanggal 6 April 2015

Buku

Dirjen Kerjasama ASEAN, 2012, *ASEAN Selayang Pandang*, edisi ke-20, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jakarta.

Fetter, Steve, *The technical Dimension: Stockpile Declarations* (sipri.org)

Mearsheimer, John., 2006. “Structural Realism” dalam *International Relations Theories: Discipline and Diversity*, dieditori Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith Oxford: Oxford University Press.

Rourke, John T, 1995. *International Politics on the World Stage, 5th ed.*, Connecticut: Dushking Publishing Group.

Russett, Bruce & Harvey Starr. 1996. *World Politics: The Menu for Choice* (New York: W. H. Freeman Company. hal. 11

Viotti, Paul R & Mark V Kioppi, 1997. *International Relations and World Politics: Security, Economic, Identity*. Prentice Hall, Inc

Waltz, Kenneth., 2001. *Man, the State and War*. New York: Columbia University Press

Internet

<http://en.wikipedia.org/wiki/Weapon_of_mass_destruction> . diakses tanggal 19 April 2015

<<http://www.asean.org/communities/asean-political-security-community/item/joint-statement-of-the-asean-foreign-ministers-on-the-observance-of-asean-day-manila-30-july-2007>>. Di akses tanggal 25 November 2014

<<http://www.csis.or.id/Publications-OpinionsDetail.php?id=212>>. Diakses tanggal 5 April 2015

<<http://www.gatra.com/politik-1/4828-segera-tanda-tangani-protokol-anti-senjata-nuklir.html>>. Di akses tanggal 25 November 2014

<<http://www.nti.org/treaties-and-regimes/southeast-asian-nuclear-weapon-free-zone-seanwfp-treaty-bangkok-treaty/>> Di akses tanggal 22 Oktober 2014

<<http://www.tempo.co/read/news/2013/06/10/118487163/ASEAN-Desak-Negara-Besar-Dukung-Zona-Anti-Nuklir>>. Di akses tanggal 21 Oktober 2014

<<https://geneva.usmission.gov/2013/01/22/ambassador-kennedys-statement-at-the-conference-on-disarmament-plenary/>> . Di akses tanggal 27 Oktober 2014.

Ade Marboen, Negosiasi bebas nuklir ASEAN-P5. Diakses dari <<http://www.antaranews.com/berita/284810/negosiasi-bebas-nuklir-asean-p5-sangat-produktif>> diakses tanggal 18 April 2015

An Introduction to the Conference, <<http://www.unog.ch/>> . Diakses tanggal 7 April 2015

Chemical Weapons Convention. <<https://www.opcw.org/chemical-weapons-convention/>> . diakses tanggal 7 April 2015.

Julkifli Marbun, Putin Sebut Rusia Tidak Berambisi Rebut Hegemoni Dunia. Tersedia di <<http://www.republika.co.id/berita/ internasional/global/13/12/13/mxp98q-putin-sebut-rusia-tidak-berambisi-rebut-hegemoni-dunia>>. Di akses tanggal 4 Mei 2015.

Sukarjaputra, Rakaryan., SEANWFZ, Korut, dan Keamanan Asia. Tersedia di <http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=8531&coid=1&caid=27&gid=3> diakses tanggal 20 April 2015.

The Biological Weapons Convention., <www.unog.ch/bwc> . diakses tanggal 7 April 2015.

Zachary Keck. *Russia's Military Begins Massive Nuclear War Drill*. 29 Maret 2014. Tersedia di <<http://thediplomat.com/2014/03/russia-s-military-begins-massive-nuclear-war-drill/>>. Di akses tanggal 5 Mei 2015.

Dokumen

Perjanjian UNCLOS pasal 57 terkait Lebar Zona Ekonomi Eksklusif Tersedia di <<http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=SCS>>, diakses tanggal 6 April 2015.